

55/01

**PERANAN DEWAN KEAMANAN  
PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA  
DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PALESTINA**

ABSTRAK SKRIPSI

55 / H / 192  
55 HI / A



**OLEH**

*Anastasia Daisy Ina Soebagio*

**NRP 2870042**

**NIRM 87.7.004.12061.10782**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1991**

Surabaya, 21 Nopember 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Anastasia Daisy Ina Soebagio

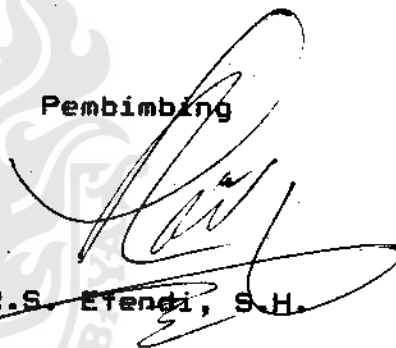
Mengetahui

D e k a n

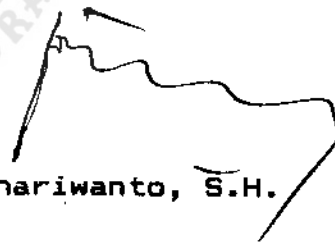
Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.



R.S. Efendi, S.H.



Suhariwanto, S.H.

Dalam perkembangan mengenai penyelesaian masalah Palestina sekarang ini, tentunya tidak dapat terlepas dari peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maksud dari peranan Dewan Keamanan adalah bahwa sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap perdamaian Dewan Keamanan seharusnya dapat menyelesaikan pertikaian antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi mengenai wilayah Palestina, apabila eksistensinya sebagai badan penegak perdamaian ingin diakui.

Dengan menganalisa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, maka peranan Dewan Keamanan itu telah diatur dalam pasal 24 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana dalam pasal itu disebutkan bahwa Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan untuk menyelesaikan masalah Palestina adalah dengan mengeluarkan Resolusi no. 242 dan no. 338.

Sampai saat ini Resolusi Dewan Keamanan no. 242 dan no. 338 tersebut tidak ditaati oleh Israel yang masih belum mau menyerahkan wilayah yang didudukinya kepada Palestina. Demikian pula bangsa Palestina yang menghendaki seluruh wilayahnya dikembalikan oleh Israel. Jadi Peranan Dewan Keamanan tidak sebagaimana yang telah

diatur dalam pasal 24 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan skripsi. Sehingga kebenaran dari skripsi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah Palestina. Dalam pembahasan permasalahan yang saya tulis dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu segala permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Pada skripsi ini saya menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas, sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari literatur-literatur, majalah, surat kabar, karya ilmiah. Untuk melengkapi data sekunder, saya lakukan wawancara dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan (angket) kepada pihak United Nation Information Centre.

Setelah data-data saya peroleh kemudian saya

klasifikasikan dan saya analisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang umum yaitu peraturan perundang-undangan ke hal yang khusus, yaitu diterapkan pada permasalahan yang dibahas. Sedangkan analisa datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sesuatu yang diamati. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dalam skripsi ini.

Jadwa waktu yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- fase pengumpulan data : 2 bulan
- fase pengolahan data : 1 bulan
- fase laporan : 1 bulan

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dengan adanya eksonerasi klausula yang terdapat dalam pasal-pasal Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebab para pihak yang bersengketa tidak dapat dipaksa untuk mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan juga adanya hak veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah peranan Dewan Keamanan, dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah Palestina.

Lokasi penelitian adalah United Nation Information

Centre di Jakarta.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Dewan Keamanan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai badan penegak perdamaian, dalam kaitannya dengan masalah Palestina karena adanya hak veto dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan seperti yang tercantum dalam pasal 27 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimana setiap keputusan Dewan Keamanan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan anggota tetapnya akan diveto dan keputusan itu akan menjadi mentah kembali.

